BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perencanaan Pembangunan *(Development Planning)* adalah suatu bentuk perencanaan yang berkaitan dengan upaya meningkatkan pertumbuhan tingkat ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang tidak terlepas dari kegiataan perencanaan pembangunan. Dari masa ke masa, ternyata Negara Indonesia telah mengalami perubahan paradigma dalam perencanaan pembangunan. Setidaknya sejak dimulainya era reformasi, paradigma perencanaan pembangunan berganti dari perencanaan komprehensif menjadi perencanaan strategis. Paradigma perencanaan strategis dipilih oleh pemerintah karena dirasa memiliki manfaat yang jelas dalam jangka waktu yang singkat. Semakin maju suatu negara semakin banyak yang terdidik, dan banyak pula orang yang menganggur, maka semakin dirasakan pentingnya dunia wirausaha.

Berkembangnya perekonomian di seluruh Indonesia ditandai dengan banyaknya usaha yang telah berdiri diberbagai bidang, salah satunya menumbuh kembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu jenis usaha yang sangat banyak di Indonesia. Dalam perekonomian, Indonesia tidak terlepas dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh individu maupun kelompok, terkait pula dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM merupakan kegiatan ekonomi yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia, dimana UMKM sangat

berperan penting dalam menciptakan lapangan pekerjaan, sekaligus membantu pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran yang ada.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) juga merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau besar.

Disamping itu kegiatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pastinya tidak terlepas dari aktivitas akuntansi yang sangat berguna untuk menunjukkan perkembangan atau kondisi keuangan pada UMKM. Kelangsungan hidup UMKM dapat menjadi bahan untuk mengevaluasi kegiatan UMKM.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia sehingga secara tidak langsung peranan UMKM di perekonomian nasional terhitung cukup besar. Jumlah tersebut mencapai 98% dan penyerapan tenaga kerja mencapai 97%. Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa UMKM di Indonesia semakin berkembang apabila UMKM di kelola dengan baik sehingga dapat menopang perekonomian Indonesia (www.depkop.go.id).[1]

Kemampuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian Indonesia di dukung oleh berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah, perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Artinya, Pengenbangan UMKM sudah menjadi titik fokus pemerintah untuk menangani krisis ekonomi di Indonesia. Pemerintah akan terus berusaha untuk mendorong UMKM untuk terus

[1] www.depkop.go.id.

memberikan bantuan keuangan melalui Kredit Usaha. Meskipun kemajuan UMKM di Indonesia sangat pesat, pengusaha di UMKM memiliki pemahaman yang lemah mengenai akuntansi dan laporan keuangan dan urgensi penggunaannya. Oleh karena itu, perlu untuk membekali mereka dengan pengetahuan akuntansi dan pelaporan keuangan.

Masih rendahnya pemahaman pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mengenai akuntansi dan standar akuntansi keuangan menjadi masalah mendasar bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Hal tersebut menyebabkan suatu UMKM sulit untuk membuat dan mengelola laporan keuangan. Dengan adanya Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) pada 1 Januari 2011 diharapkan dapat membantu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam membuat laporan keuangan dengan mudah, transparan dan akuntabel. Namun, masih banyak UMKM yang belum mampu menerapkan laporan keuangannya berdasarkan SAK-ETAP dengan benar karena dianggap masih terlalu rumit untuk di terapkan.

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) selanjutnya menyusun Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang lebih sederhana dari Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM). Hal ini di karenakan masih banyak UMKM di Indonesia yang belum mampu untuk membuat serta menyusun laporan keuangannya sesuai dengan SAK-ETAP. Pada tanggal 1 Januari 2018 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) efektif di berlakukan sebagai standar yang bisa membantu pengusaha UMKM di Indonesia. SAK EMKM memang ditujukan

kepada UMKM agar semakin mudah dalam menyusun serta membuat laporan keuangan, karena SAK EMKM ini jauh lebih sederhana dari SAK-ETAP.

SAK EMKM di rancang secara khusus sebagai patokan Standar Akuntansi Keuangan pada UMKM. Standar Keuangan ini disusun dan disahkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) sebagai senuah organisasi profesi yang menaungi akuntan di Indonesia (www.iaiglobal.or.id).[2]

SAK EMKM merupakan salah satu standar akuntansi keuangan yang telah berdiri sendiri dan dapat digunakan oleh entitas yang termasuk dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) mendeskripsikan konsep entitas sebagai salah satu asumsi dasarnya dan oleh karena itu untuk dapat menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM, sebuah entitas juga harus memisahkan kekayaan pribadi pemilik dengan kekayaan hasil usaha entitas. Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) laporan keuangannya terdiri dari 3 unsur antara lain :

1. Laporan Posisi Keuangan, merupakan laporan yang akan menyajikan informasi mengenai aset, hutang dan ekuitas dari suatu perusahaan pada akhir periode pelaporan.
2. Laporan Laba Rugi, merupakan laporan yang akan menyajikan informasi mengenai pendapatan dan biaya dari suatu entitas.
3. Catatan Atas laporan Keuangan, merupakan laporan yang berupa informasi tambahan dan rincian pos-pos tertentu yang relevan.

[2] www.iaiglobal.or.id.

Tingginya potensi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam perkembangan perekonomian tidak di imbangi dengan kualitas UMKM seperti kurangnya pencatatan dan pengelolaan keuangan yang merupakan faktor kunci dalam keberhasilan UMKM tersebut. Permasalahan yang paling mendasar pada UMKM adalah pencatatan dan penyusunan laporan keuangan yang belum memadai dan sangat sederhanakan, seperti mencatat jumlah barang diterima dan barang dikeluarkan, jumlah barang yang dibeli dan barang yang dijual, dan jumlah piutang dan hutang tanpa menggunakan Standar Keuangan yang ada, sehingga masih belum mencerminkan informasi keuangan yang sebenarnya di dalam UMKM tersebut.

Panglong Anugrah yang berlokasi di Sukaraya, Jalan Glugur Rimbun Kabupaten Deli Serdang, merupakan salah satu UMKM yang bergerak di bidang bangunan. Pada bulan Januari 2021 peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Mery selaku manajer serta pemilik Panglong Anugerah. Berdasarkan hasil wawancara tersebut memperlihatkan bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Panglong Anugerah belum menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) yang telah diberlakukan untuk UMKM, hal ini dikarenakan masih minimnya informasi dan sosialisasi mengenai SAK EMKM kepada pelaku UMKM.

Kemudian pencatatan di Panglong Anugerah juga masih tergolong sederhana, dengan hanya mencatat pemasukan seperti penjualan dan pengeluaran seperti pembelian dan membayar biaya-biaya yang dikeluarkan setiap harinya. Panglong Anugerah menghadapi permasalahan dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil

dan Menengah (SAK EMKM). Kendala yang dialami oleh Panglong Anugerah yaitu belum terlalu memahami tentang laporan keuangan.

Menyadari situasi dan kondisi seperti ini, maka dari itu diperlukan inovasi dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Standar laporan keuangan yang akurat akan membantu para Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam pengembangan bisnisnya. Jika UMKM sudah memiliki standar laporan keuangan maka Bank akan lebih mudah untuk merespon dan menilai kelayakan UMKM untuk mendapatkan kredit usaha. Oleh karena itu pentingnya laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) yang harus dibuat oleh UMKM sebagai alat untuk mendapatkan akses modal yang lebih mudah dari pihak lembaga keuangan.

Dari latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **Penyusunan Laporan Keuangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berdasarkan SAK EMKM Pada Panglong Anugrah)**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat di ambil oleh peneliti yaitu : Bagaimana penyusunan laporan keuangan pada Panglong Anugrah ?

1.3 Batasan Masalah

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang maksimal maka penelitian ini perlu adanya batasan. Batasan penelitian ini adalah antara lain:

1. Penelitian ini hanya membahas mengenai Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah SAK EMKM).
2. Penelitan ini hanya menggunakan satu objek Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) saja dalam penelitiannya.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai penyusunan laporan keuangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM).

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak berkepentingan, sehingga manfaat dari penelitian ini antara lain :

1. Bagi Pemilik Usaha Mikro Kecil dan Menengah

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memudahkan pemilik usaha dalam membuat laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM.

2. Bagi Akademis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat di jadikan sebagai acuan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi tentang penyusunan laporan keuangan berdasarkan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM).

3. Bagi Peneliti

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan manfaat kepada peneiti tentang penyusunan laporan keuangan Usaha Mikro

Kecil dan Menengah (UMKM) berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Enttas Mikro Kecil dan Menengah. (SAK EMKM).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

2.1.1 Definisi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Terdapat beberapa definisi mengenai Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Berikut definisi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menurut dari beberapa instansi :

Definisi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 bahwa **:"Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah usaha ekonomi produktif milik perorangan atau badan usaha milik perorangan yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang dari perusahaan yang dimliki, di kuasai atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha yang memenuhi kriteria usaha kecil".**[3]

Definisi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menurut Kementerian Koperasi dan UMKM dalam buku Aufar (2014) bahwa :

> **"Usaha Mikro dan Usaha Kecil adalah entitas yang mempunyai kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000. Sementara, Usaha Menengah merupakan entitas usaha milik warga negara Indonesia yang**

[3] Undang-Undang No. 20 , **Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah,** 2008

memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 200.000.000 sampai dengan 10.000.000.000 tidak termasuk tanah tanah dan bangunan"[4]

Definisi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menurut Bank Indonesia dalam buku Aufar (2014), bahwa :**"Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah usaha milik warga negara indonesia yang berbentuk badan usaha perorangan yang bukan merupakan anak perusahaan. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan. Sedangkan, Usaha Menengah merupakan usaha yang memiliki kriteria aset tetapnya dengan besaran yang dibedakan antara industri manufaktur (Rp 200.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000) dan non manufaktur (Rp 200.000.000 sampai dengan Rp 600.000.000)".**

Berdasarkan definisi diatas dapat dikatakan bahwa :

"Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah usaha milik orang perorangan badan usaha yang bukan merupakan anak atau cabang perusahaan lain dengan kriteria memiliki modal usaha yang memiliki batasan-batasan tertentu".

2.1.2 Kriteria dan Ciri-Ciri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Agar dapat membedakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) diperlukan kriteria dan ciri-ciri dalam menggolongkan UMKM.

Menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2008, Usaha Mikro Kecl dan Menengah (UMKM) digolongkan berdasarkan kriteria sebagai berikut :

1. Usaha Mikro

   Kriteria entitas yang tergolong dalam usaha mikro apabila suatu entias memiliki kekayaan bersih tidak termasuk tanah dan bangunan yang digunakan

[4] Aufar, **Usaha Mikro Kecil dan Menengah**, Jakarta 2014, hal 8

sebagai tempat usaha maksimal sebesar Rp 50.000.000 atau dapat dilihat dari kriteria penghasilan usahanya, apabila suatu entitas mempunyai penghasilan dari penjualannya maksimal sebesar Rp 300.000.000 maka entitas tersebut masuk dalam kriteria usaha mikro.

2. Usaha Kecil

   Kriteria entitas yang tergolong dalam usaha skala kecil apabila suatu entitas memiliki kekayaan bersih minimal sebesar Rp 50.000.000 dan maksimal mempunyai kekayaan bersih senilai Rp 500.000.000. Kekayaan bersih tersebut tidak termasuk dengan tanah dan bangunan yang digunakan sebagai tempat usahanya. Atau dapat di lihat dari kriteria penghasilan penjualannya lebih dari Rp 300.000.000 sampai dengan maksimal sebesar Rp 2.500.000.000.

3. Usaha Menengah

   Kriteria usaha yang termasuk dalam skala usaha menengah dapat dilihat dari kekayaan bersih yang dimiliki suatu entitas lebih dari Rp 500.000.000 sampai dengan maksimal sebesar Rp 10.000.000.000. Kriteria usaha menengah juga dapat dilihat dari hasil penjualan suatu entitas lebih dari Rp 2.500.000.000 atau maksimal hasil penjualannya sebesar Rp 50.000.000.000.

2.1.3 Jenis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Jenis Usaha Mikro Kecil dan Menengah dikategorikan berdasarkan jenis produk atau jasa yang dihasilkan, maupun aktivitas yang dilakukan oleh suatu usaha, serta mengacu pada kriteria UMKM menurut KADIN (Kamar Dagang Indonesia), juga kriteria dari Bank Indonesia, yaitu :

1. Usaha Perdagangan

   Terdiri dari keagenan yaitu: agen koran dan majalah, sepatu, pakaian dan lain-lain. Pengecer yaitu: minyak, sembako, sembako dan lain sebagainya. Ekspor atau impor: berbagai produk lokal dan internasional. Sektor informal: pengumpulan barang bekas, kaki lima dan lain sebagainya.

2. Usaha Pertanian

   Terdiri dari pertanian pangan maupun perkebunan seperti: bibit dan peralatan pertanian, buah-buahan dan lain sebagainya. Perikanan darat dan laut seperti: tambak udang, pembuatan kerupuk ikan dan produk lain dari hasil perikanan.

3. Usaha Industri

   Terdiri dari industri logam atau kimia seperti: pengrajin logam, kulit, keramik, fiberglass, marmer dan lain sebagainya. Industri makanan dan minuman seperti: makanan tradisional, minuman ringan dan catering. Aneka industri kecil seperti: pengrajin perhiasan, ukiran batu dan lain-lain.

4. Usaha Jasa

   Terdiri dari konsultan seperti: hukum, pajak, manajemen. Perbengkelan seperti: bengkel mobil dan elektonik. Transportasi seperti: angkutan umum, travel dan taksi,

5. Usaha Jasa Konstruksi

   Terdiri dari kontaktor bangunan, jalan, kelistrikan, jembatan, pengairan dan usaha-usaha lain yang berkaitan dengan teknis konstruksi bangunan.

2.2 Laporan Keuangan

2.2.1 Definisi Laporan Keuangan

Secara umum laporan keuangan adalah laporan yang berisi pencatatan dan transaksi yang terjadi dalam bisnis, baik transaksi pembelian dan transaksi lainnya yang memiliki nilai ekonomi.

Menurut Kasmir (2008):

> **Dalam pengertian yang sederhana, Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam satu periode tertentu. Laporan keuangan yang menunjukkan kondisi perusahaan saat ini merupakan kondisi terkini. Biasanya laporan keuangan dibuat per periode, seperti satu bulan, empat bulan, enam bulan, atau satu tahun untuk kepentingan internal perusahaan. Dengan adanya laporan keuangan, maka dapat diketahui posisi keuangan perusahaan terkini setelah menganalisis laporan keuangan tersebut dianalisis.**[5]

Menurut Hery (2016), **"Laporan Keuangan *(Financial Statements)* merupakan produk akhir dari serangkaian proses pencatatan dan mengikhtisarkan data transaksi bisnis. Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan kata lain, laporan keuangan**

[5] Kasmir, **Analisis Laporan Keuangan**, PT. RajaGrindo Persada. Jakarta, 2008, hal 7

berfungsi sebagai alat informasi yang menghubungkan perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan, yang menunjukkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dan kinerja perusahaan."[6]

Menurut Pirmatua (2016):

> **"Pengertian Laporan Keuangan *(Financial Statements)* adalah informasi kuantitatif keuangan suatu entitas dalam periode tertentu, dan merupakan proses akuntansi. Laporan keuangan juga merupakan dasar analisis untuk kepentingan berbagai pengambilan keputusan yang penting karena laporan keuangan relevan, komprehensif dan akurat serta reliabel."**[7]

Dari definisi-definisi diatas Laporan Keuangan dapat di definisikan "Sebagai suatu ringkasan mengenai laporan yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan yang terjadi selama suatu periode tertentu".

2.2.2 Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan keseluruhan dari laporan posisi keuangan adalah untuk memberikan informasi yang berguna bagi investor dan kreditor dalam pengambilan keputusan investasi dan kredit. Tujuan khusus laporan keuangan adalah menyajikan posisi keuangan, hasil usaha dan perubahan posisi keuangan lainnya secara wajib.

Menurut Fahmi (2011), **"Tujuan utama Laporan Keuangan memberikan informasi keuangan yang mencakup perubahan dari unsur-**

---

[6] Hery, **Analisis Laporan Keuangan**, PT. Gravindo. Jakarta, 2016
[7] Pirmatua, **Analisis Laporan Keuangan**, Salemba Empat . Yogyakarta, 2016, hal 20

unsur laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam menilai kinerja keuangan terhadap perusahaan disamping pihak manajemen.[8]

Menurut SAK EMKM (2018), **tujuan Laporan Keuangan adalah untuk menyediakan informasi keuangan dan kinerja suatu entias yang bermanfaat bagi jumlah besar pengguna dalam pengambian keputusan.**[9]

Menurut Dwi Prastowo (2019) :

> **"Laporan Keuangan disusun dengan tujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi."**[10]

Menurut Hery (2016), **"Tujuan dari Laporan Keuangan adalah untuk memberikan informasi yang berguna bagi investor dan kreditor dalam pengambilan keputusan investasi dan kredit. Tujuan khusus laporan keuangan adalah menyajikan laporan keuangan, hasil usaha, dan perubahan posisi keuangan lainnya secara wajar dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum."**

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 dalam buku Hery (2016), menjelaskan bahwa :

---

[8] Fahmi, **Analisis Laporan Keuangan** , PT.Gravindo. Jakarta, 2011, hal 28
[9] IAI, **Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah**, Ikatan Akuntan Indonesia . Jakarta, 2018
[10] Dwi Prastowo, **Analisis Laporan Keuangan**, Salemba Empat. Jakarta, 2019, hal 25

"Tujuan Laporan Keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan".

Menurut Kasmir (2008), terdapat beberapa tujuan dalam penyusunan Laporan Keuangan, sebagai berikut :

1. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan
2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan
3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu
4. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suau periode tertentu
5. Memberika informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva dan modal perusahaan
6. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode
7. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa :

"Tujuan Laporan Keuangan adalah untuk menyediakan atau memberikan informasi keuangan yang mencakup perubahan-perubahan dari unsur laporan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan serta menjadi alat pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan".

2.2.3 Pihak-Pihak Pengguna Laporan Keuangan

Dalam rangka menjalankan aktivitasnya untuk menghasilkan barang dan jasa, perusahaan akan berinteraksi dengan berbagai pihak-pihak yang berhubungan dengan perusahaan tersebut.

Menurut Harahap (2008), Pihak-pihak yang berhubungan dengan laporan keuangan perusahaan adalah :[11]

1. Kreditor, yaitu orang atau perusahaan yang memberikan pinjaman dana kepada perusahaan untuk menjan bahwa uang yang di pinjamkan akan dibayar beserta bunganya. Karena itu informasi yang diperlukan mencakup :
   a. Besarnya kekayaan perusahaan
   b. Kemampuan menghasilkan laba
   c. Perbandingan utang dan total kekayaan perusahaan
2. Pemerintah, yaitu lembaga yang memiliki kewenangan untuk membuat peraturan usaha dan ha-hal yang terkait dengannya. Sebagai informasi utama yang diperlukan pemerintah mencakup :
   a. Laba usaha yang diperoleh
   b. Beban yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan
3. Investor, yaitu orang-orang atau lembaga yang akan menanamkan uangnya dalam perusahaan. Sebagai informasi yang diperlukan investor mencakup :
   a. Laba usaha yang diperoleh
   b. Pertumbuhan kekayaan perusahaan
4. Pemasok (supplier), yaitu orang-orang atau perusahaan yang menjual berbagai barang kepada perusahaan mulai dari peralatan kantor, persediaan dan lain

[11] Harahap, **Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan**, PT. Gravindo, 2008, hal 7

sebagainya. Sebagai pihak penjual barang secara kredit kepada perusahaan, pemasok harus memiliki keyakinan bahwa kredit yang diberikannya kepada perusahaan akan dapat dibayar sesuai kesepakatan. Karena itu, informasi yang diperlukan pemasok mencakup :

a. Besarnya kekayaan perusahaan
b. Kemampuan menghasilkanlaba usaha
c. Perbandingan utang dan total kekayaan perusahaan

5. Pemilik/ Pemegang Saham, yaitu orang-orang atau lembaga yang telah menanamkan uang atau kekayaan pada perusahaan. Sebagai pihak yang telah menanamkan uangnya dalam perusahaan, pemilik perusahaan harus memperoleh imbalan atas kekayaan yang telah ditanamkannya tersebut. Imbalan dapat berupa pembagian atas sebagian atau seluruh laba usaha yang telah diperoleh perusahaan. Karena itu, informasi utama yang diperlukan adalah :

   a. Laba yang diperoleh
   b. Kekayaan perusahaan

2.2.4 Karakteristik Laporan Keuangan

Karakteristik laporan keuangan merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi para pengguna.

Adapun karakteristik laporan keuangan menurut Pirmatua (2016), adalah sebagai berikut :

1. Relevan

   Informasi dapat digunakan oleh pengguna untuk oses pengambilan keputusan. Informasi dikatakan kualitas yang relevan jika dapat mempengaruhi keputusan

ekonomi pengguna dengan cara membantunya mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan dan mengoreksi hasil evaluasinya di masa lalu.

2. Representasi tepat

   Informasi yang disajikan secara tepat atau secara apa yang seharusnya disajikan dan bebas dari kesalahan material dan bias. Informasi dipandang bersifat material jika kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi.

3. Keterbandingan

   Informasi dalam laporan keuangan entitas dapat dibandingkan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Informasi dalam laporan keuangan entitas juga dapat dibandingkan antar entitas untuk mengevaluasi posisi dan kinerja perusahaan. Karena itu, pengukuran dan penyajian dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk suatu entitas antar periode.

4. Keterpahaman

   Informasi yang disajikan dapat dengan mudah dipahami oleh pengguna. Pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi tersebut dengan penuh ketekunan.

5. Keandalan

   Informasi bebas dari kesalahan material dan bias, dan penyajian secara jujur apa yang seharusnya disajikan atau secara wajar diharapkan dapat disajikan.

6. Kelengkapan

Laporan keuangan yang disajikan lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Informasi harus semua diungkapkan agar tidak menyesatkan.

2.3 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM)

2.3.1 Definisi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM)

Menurut SAK EMKM (2018), **"Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2018 merupakan salah satu standar akuntansi keuangan yang telah berdiri sendiri dan dapat digunakan oleh entitas yang termasuk dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)."** [12]

Secara eksplisit Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) mendeskripsikan konsep entitas sebagai salah satu asumsi dasarnya dan oleh karena itu untuk dapat menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM, sebuah entitas juga harus memisahkan kekayaan pribadi pemilik dengan kekayaan hasil usaha entitas tersebut.

Pada tahun 2009 Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) dan berlaku efektif efektif pada tanggal 1 Januari 2011 untuk membantu pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan, namun dalam prakteknya pelaku UMKM kesulitan dalam menerapkan SAK-ETAP. Kemudian pada tahun 2016 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) mulai disahkan oleh Dewan Standar

[12] IAI, **Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah**, Ikatan Akuntan Indonesia . Jakarta, 2018

Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI). Dengan disahkan SAK EMKM tersebut diharapkan dapat dimudahkan pelaku UMKM dalam Membuat laporan keuangan.

2.3.2 Laporan Keuangan Entitas Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah (SAK EMKM)

Menurut SAK EMKM (2018), Laporan keuangan suatu entitas dibuat dengan tujuan untuk menyediakan informasi posisi keuangan dan kinerja suatu entitas yang nantinya akan bermanfaat bagi para pengguna dalam mengambil keputusan, misalnya saja laporan keuangan dapat membantu pihak entitas dalam mencari tambahan modal ke lembaga keuangan dan lembaga keuangan dapat melihat laporan keuangan entitas tersebut menjadi dasar pengambilan keputusan apakah layak atau tidak mendapat pinjaman modal. Dalam penyajiannya laporan keuangan harus memiliki syarat tertentu dalam menyajikan informasi keuangannya harus relevan, representasi tepat, keterbandingan dan keterpahaman.

Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) laporan keuangannya terdiri dari 3 unsur, antara lain :

1. Laporan Posisi Keuangan

Laporan Posisi Keuangan merupakan laporan yang akan menyajikan informasi mengenai aset, hutang dan ekuitas dari suatu perusahaan pada akhir periode pelaporan. Unsur-unsur yang disajikan Laporan Posisi Keuangan dapat mencakup pos-pos sebagai berikut :

a. Kas dan setara kas

b. Piutang

c. Persediaan

d. Aset tetap

e. Hutang usaha

f. Hutang bank

g. Ekuitas

Suatu entitas dapat menyajikan pos dan bagian dari pos dalam laporan posisi keuangan jika penyajian tersebut relevan untuk memahami posisi keuangan entitas. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) juga tidak menentukan format atau urutan terhadap pos-pos yang disajikan.

2. Laporan Laba Rugi

Laporan Laba Rugi merupakan laporan yang akan menyajikan informasi mengenai pendapatan dan biaya dari suatu entitas. Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) Laporan Laba Rugi dapat mencakup pos-pos sebagai berikut :

a. Pendapatan

b. Beban keuangan

c. Beban pajak

Entitas dapat menyajikan pos dan bagian dari pos dalam Laporan Laba Rugi jika penyajian tersebut relevan untuk memahami kinerja keuangan entitas. Laporan Laba Rugi memasukkan semua penghasilan dan beban yang diakui dalam suatu periode.

3. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan laporan yang berupa informasi tambahan dam rincian pos-pos tertentu yang relevan. Catatan Atas Laporan Keuangan yang disajikan memuat informasi sebagai berikut :

a. Suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM).
b. Ikhtisar kebijakan akuntansi
c. Informasi tambahan dan rincian pos tertentu yang menjelaskan transaksi penting dan material sehingga bermanfaat bagi pengguna untuk memahami laporan keuangan.

Jenis informasi tambahan dan rincian yang akan disajikan pada Catatan Atas Laporan Keuangan tergantung pada jenis kegiatan usaha yang dilakukan oleh suatu entitas. Catatan Atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis sepanjang hal tersebut praktis.

2.4 Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini dapat disajikan pada tabel 2.4

Tabel 2.4 Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Metode	Hasil Penelitian
1	Jilma Dewi Ayu Ningtyas, S.Pd, M.Si (2017)	Penyusunan Laporan Keuangan UMKM Berdasarkan Standar Akuntansi	Kualitatif	Kesimpulan bahwa laporan keuangan UMKM Bintang Malam Pekalongan yang disusun peneliti berdasarkan SAK EMKM yang

		Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) (Studi Kasus di UMKM Bintang Malam Pekalongan)		menyajikan: 1. Posisi keuangan yang disajikan dalam neraca per 30 April 2017. 2. Laporan laba rugi per 30 April 2017. Catatan atas laporan keuangan yang menyajikan gambaran umum perusahaan.
2	Ni Komang Ismadewi, Nyoman Trisna Herawati, Anantawikram Tungga Atmaja (2017)	Penyusunan Laporan Keuangan Sesuai Dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) Pada Usaha Ternak Ayam Boiler (Studi Kasus Pada Usaha I Wayan Sudiarsa Desa Pajahan Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan)	Kualitatif	Laporan keuangan yang dibuat masih sangat sederhana karena belum mengetahui tentang format yang benar, karena UMKM tersebut masih kurang memahami dan mengerti bagaimana penyusunan laporan keuangan yang seharusnya. Adapun kendala dalam penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM yaitu sumber daya manusia dalam bidang keuangan, tingkat kompetensi dan limgkup usahanya masih kecil.
3	Diajeng Amatullah Azizah	Analisis Penyusunan Laporan	Kualitatif Deskriptif	UMKM Batik Jumput Dahlia belum mampu

	Rachmanti, Misrin Hariyadi, Andrianto	Keuangan UMKM Batik Jumput Dahlia Berdasarkan SAK EMKM		menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM. Karena UMKM tersebut masih kurang pemahaman dalam penyusunan laporan keuangannya dengan benar.
4	Muhammad Susanto, Rintan Nuzul Ainy	Penyusunan Laporan Keuangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Berdasarkan SAK EMKM (Studi Kasus di UMKM Fresh Fish Bantul)	Kualitatif Deskriptif	UMKM Fresh Fish Bantul belum menerapkan SAK EMKM dalam penyusunan laporan keuangannya. Karena masih kurangnya pemahaman tentang penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM.
5	Rizky Aminatul Mutiah (2019)	Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan Pada UMKM Berbasis SAK EMKM (Studi Kasus UMKM Silky Parijatah)	Deskriptif Kualitatif	Laporan keuangan yang dibuat oleh UMKM Silky Parijatah masih sangat sederhana yaitu, hanya mencatat pembelian dan penjualan. UMKM tersebut belum menyajikan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2016), Penelitian kualitatif sebagai penelitian dengan beberapa karakteristik yaitu dilakukan pada kondisi yang alamiah, bersifat deskripsi, menekankan pada proses, analisis data secara induktif, serta lebih menekankan pada makna.[13]

Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah jenis pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif yaitu analisis data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data, mengelola dan kemudian menyajikan data observasi agar pihak lain dapat mudah memperoleh gambaran mengenai objek yang diteliti.

Penelitian kualitatif deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menggambarkan mengenai Penyusunan Laporan Keuangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) pada Panglong Anugrah.

3.2 Waktu dan Lokasi Penelitian

Peneitian ini dimulai dari bulan Maret 2021 hingga selesainya penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Lokasi penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Panglong Anugrah yang

[13] Sugiyono, **Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R dan D**. CV. Alfabeta. Bandung, 2016, hal 240

berada di Sukaraya, Jalan Glugur Rimbun, Kabupaten Deli Serdang. Alasan memilih objek ini sebagai objek penelitian karena perusahaan tersebut belum menyusun laporan keuangannya sesuai Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) dan perusahaan tersebut bersedia dijadikan sebagai objek penelitan.

3.3 Data dan Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

3.3.1 Data Primer

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Menurut Sugiyono (2015), Data primer adalah sumber data yang didapatkan secara langsung dari informasi tanpa melalui media perantara. Data primer diperoleh secara langsung dari pemilik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yaitu Ibu Mery Ginting serta tangan kanannya Kak Indri dengan cara observasi ke lokasi penelitian dan wawancara.[14]

3.3.2 Data Sekunder

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Sunyoto (2013), Data sekunder adalah data yang bersumber dari catatan-catatan yang ada pada perusahaan dan dari sumber lainnya yaitu dengan mengadakan studi keperpustakaan seperti buku-buku, jurnal, media informasi dan bahan-bahan lainnya yang dikumpulkan oleh peneliti.[15]

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling utama dalam melakukan penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah untuk mendapatkan

[14] Sugiyono, **Metode Penelitian Pendidikan**, CV.Alfabeta. Bandung , 2015, hal 245
[15] Sunyoto, **Metode Penelitian Akuntansi**, PT. Refika Aditama. Bandung, 2013, hal 214

data. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti, antara lain :

3.4.1 Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode dokumentasi untuk memperoleh sejarah berdirinya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan data-data keuangan yang sudah dibuat oleh Panglong Anugrah.

3.4.2 Wawancara

Menurut Lexy J. Moleong (2014), Wawancara adalah percakapan yang bertujuan untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara *(interviewer)* yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara *(interviewee)* yang memberikan jawaban atas pertanyaan. [16]Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada pemilik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yaitu Ibu Mery Ginting. Sebelum melakukan wawancara, peneliti menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada subjek penelitian. Setiap wawancara juga diharapkan akan memberikan pengetahuan mengenai bagaimana penyusunan laporan keuangan yang di buat oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Panglong Anugrah tersebut.

[16] Lexy J. Moleong, **Metodologi Penelitian Kualitatif**, PT. Remaja Rosdakarya . Bandung, 2014, hal 215

3.5 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2014), analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan data yang dapat dikelola.[17]

Teknik analisis data yang digunakan dalam peneliti adalah teknik kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti menggambarkan dan menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan pencatatan keuangan Panglong Anugrah yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi dan penelusuran data online yang akan dijelaskan secara menyeluruh.

[17] Sugiyono, **Metode Penelitian Kualitatif**, CV. Alfabeta . Bandung, 2014, hal 248